

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan program bantuan pemerintah dibidang kesehatan masyarakat. BPJS dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang memerlukan layanan kesehatan yang tidak berbayar dengan demikian mendorong peningkatan kesehatan masyarakat yang tinggi. Dengan adanya bantuan kesehatan tersebut tidak ada kasus gizi buruk dan kasus lainnya yang dialami masyarakat miskin. Program pemerintah sekarang ini penerimaannya tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak dapat bantuan. Proses tingkat pelayanan BPJS yang dilakukan selama ini masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menimbulkan beberapa persoalan, diantaranya sebagai yaitu proses pengolahan data pemilihan peserta BPJS yang memakan waktu lama. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap proses penetapan didalam pemilihan tingkat pelayanan BPJS. Kemudian memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pemilihan tingkat pelayanan atau tidak tepatnya sasaran untuk masyarakat yang berhak mendapatkan tingkat pelayanan BPJS.

Rumah sakit adalah sarana penyedia jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan penjaminan Umum, BPJS Kesehatan, Perusahaan dan Asuransi. Agar dapat bertahan dan berkembang dengan baik, rumah sakit harus dapat menciptakan kemampuan bersaing yang baik, terutama dalam hal pelayanan medis, pelayanan

administrasi dan kenyamanan, sehingga dapat memenangkan persaingan. (Tugiono, T., Situmorang, M. K., & Azlan, A. 2020). Di Indonesia pemberian pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang tersebut. Misalnya orang yang mampu dan orang yang kurang mampu akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbeda, hal ini merupakan dampak dari kapasitas yang telah masuk dunia kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Menurut situs resmi milik BPJS, peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, diantaranya syarat usia dan persyaratan khusus. Peserta BPJS-PBI adalah peserta jaminan kesehatan yang ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemerintah sebagai peserta program BPJS Kesehatan, yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Yang berhak untuk ikut serta dalam BPJS Kesehatan PBI ini adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi ini menuntut masyarakat untuk semakin cepat mendapatkan informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan teknologi informasi dalam pengolahan data. Pengolahan data yang baik akan menghasilkan informasi cepat, akurat dan dapat dipercaya. Informasi merupakan acuan utama untuk mengambil kebijakan perusahaan. Dalam hal ini

mengenai kebijakan penentuan tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam penentuan tingkat pelayanan pada saat ini masih menggunakan sistem manual dengan cara peserta memilih sendiri tingkat pelayanan mana yang harus dipilih. Sedangkan tingkat pelayanan yang harus dipilih tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak BPJS.

Pada ketentuan tersebut maka sistem pendukung keputusan ini akan membantu BPJS dalam menentukan tingkat pelayanan bagi para peserta dengan melihat kriteria dari pekerjaan para peserta sehingga para peserta tidak bisa memilih sendiri kelas perawatannya. Terkadang para peserta memilih kelas perawatan tidak sesuai dengan kemampuan para peserta. Mereka lebih memilih kelas yang rendah dikarenakan bayaran tiap bulannya rendah yang semestinya mereka mampu memilih kelas perawatan yang lebih tinggi berdasarkan kriteria dari pekerjaannya. Sistem dirancang dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) karena mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Untuk efisiensi waktu dalam menentukan tingkat pelayanan peserta BPJS diperlukan penggunaan sistem pendukung keputusan yang baik. (Darnita, Y., & Muntahanah, M. 2019)

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu mengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur dan semi terstruktur. Oleh karena itu, SPK ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, yang dilanjutkan dengan proses perangkingan. Sehingga akan menghasilkan alternatif terbaik dari banyak alternatif dengan perhitungan yang cukup tepat.

Alternatifnya adalah tingkat pelayanan diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. (Hidayat, A. R., Akbar, Y., & Mulyana, D. I. 2021)

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Wali Nagari Kubu Tapan dengan judul : **”SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN TINGKAT PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) PADA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana cara menjalankan proses pendataan tingkat pelayanan yang sebelumnya menggunakan sistem manual hingga berubah menjadi sistem yang terkomputerisasi ?
2. Bagaimana menerapkan metode SAW untuk menentukan tingkat pelayanan penerimaan bantuan BPJS ?
3. Bagaimana membangun aplikasi SPK dengan menerapkan metode SAW untuk menentukan Tingkat pelayanan penerimaan bantuan BPJS berdasarkan status sosial ?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat membuat suatu hipotesis yaitu:

1. Dengan adanya sistem baru berbasis komputerisasi akan membantu

pengambil Keputusan Penentuan tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kenagarian Kubu Tapan lebih efektif dan efisien.

2. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat meminimalkan terjadinya kerangkapan data penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kenagarian Kubu Tapan.
3. Dengan adanya desain sistem yang baru pada Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan diharapkan dapat membantu pihak penanggung jawab pendistribusian bantuan tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam melakukan perhitungan penentuan tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lebih valid serta objektif yang menyebabkan bantuan tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pemerintah tersebut dapat didistribusikan secara merata yang sesuai dengan harapan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian dan penulisan skripsi dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, dan analisis yang lebih terfokus. Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu data

masyarakat atau keluarga yang kurang mampu. Dalam penyeleksian penentuan kelayakan penerimaan bantuan BPJS kesehatan terdiri dari beberapa kriteria. diantaranya yaitu keadaan rumah, pendapatan perbulan, pengeluaran perbulan, tanggungan keluarga, dan mempunyai surat keterangan tidak mampu.

2. Konten aplikasi hanya berupa tempat penginputan calon penerima bantuan BPJS kesehatan, pembuatan akun admin, input daftar penyeleksian, input penyeleksian, hasil penyeleksian, dan informasi.
3. Bahasa pemograman yang di gunakan untuk memmbangun aplikasi adalah PHP dan database MySQL.
4. Dengan metode SAW dapat membedakan kelas sosial masyarakat mampu dan kurang mampu.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana menerapkan metode SAW untuk menentukan kelayakan penerimaan bantuan BPJS.
2. Untuk mengetahui proses bagaimana membangun aplikasi SPK dengan menerapkan metode SAW untuk menentukan tingkat pelayanan bantuan BPJS.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Kantor wali:

- a. Bagi Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, untuk mempermudah dalam penyajian informasi yang akurat dan aktual serta lengkap dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
 - b. Mempermudah dalam menentukan keluarga yang lebih berhak dan layak sebagai penerima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Bagi Penulis
- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Bagaimana menerapkan Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* untuk menentukan tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - b. Dapat menerapkan ilmu yang selama ini peneliti terima dibangku perkuliahan serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan analisa terhadap suatu masalah yang lebih kritis.
3. Bagi Kampus
- a. Sebagai bahan untuk menambah referensi di Perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang khususnya program studi Sistem Informasi.
 - b. Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian.
4. Bagi Pembaca
- a. Sebagai sarana dan media untuk menerapkan dan mengembangkan wawasan di bidang ilmu pengetahuan dan komputer.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam penerapan Sistem

Pendukung Keputusan dengan menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan pemberian tingkat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

1.7 Tinjauan Umum Objek Penelitian

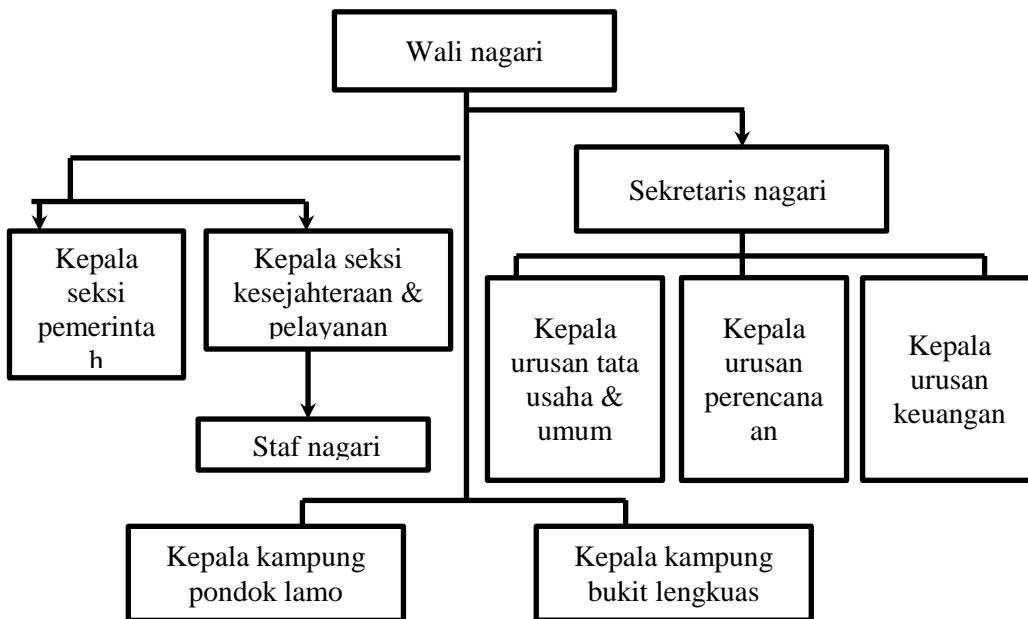
1.7.1 Sejarah Berdirinya

Nagari Kubu Tapan terletak dalam wilayah kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Yang terdiri dari Empat Suku antara lain Melayu Gadang, Melayu Kecil, Caniago dan Sikumbang. Dan sebagai Pucuk Adat Nagari adalah Makhudum Sakti. Makhudum Sakti dibunyikan dalam pepatah dan petitih Adat “ Semua Ciek Galuaknyo Ampek” dan itulah yang dinamakan Makhudum Sakti (Orang Tua Adat Nagari Tapan) Inilah dasar mufakat antara empat suku untuk memilih Wali Nagari sebagai Pemimpin Nagari Kubu Tapan.

1.7.2 Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Kampung Kubu Tapan

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang akan memberikan gambaran sistematis tentang hubungan-hubungan yang terjadi serta wewenang dan tanggung jawab masing-masing organisasi / bagian dari organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal demi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan suatu struktur organisasi sangat mempunyai arti penting agar pelaksanaan suatu kegiatan, tugas dan fungsi usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bentuk dari struktur organisasi dapat berbeda- beda antara satu dengan

yang lainnya, dan bentuk ini selalu dipengaruhi oleh fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecil dari organisasi tersebut. Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Wali Nagari Kubu Tapan lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber : dari kantor wali nagari Kubu Tapan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.7.3 Pembagian Tugas dan Wewenang

Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat dan dijelaskan secara garis besar peranan masing-masing lembaga serta tugas dan tanggung jawab setiap anggota pada Kantor Wali Nagari Kubu Tapan adalah sebagai berikut :

1. Wali Nagari

Tugas dari wali nagari adalah Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, Mengajukan rancangan peraturan Nagari, Menetapkan peraturan-

peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, Membina kehidupan masyarakat Nagari, dll.

2. Sekretaris Nagari

Tugas Pokok Sekretaris Nagari adalah Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

3. Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan

Tugas Pokoknya adalah membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Nagari, pengelolaan administrasi keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas pokoknya adalah membantu Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan

dalam penyusunan produk hukum Nagari.

6. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan umum di tingkat nagari.

7. Kepala Kampung

Tugasnya adalah membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.

8. Staf Nagari

Staf ini memiliki tugas untuk memberikan saran, konsultasi, dll.